

---

## Pengaruh Media Sosial terhadap Kebijakan Ekonomi Politik di Indonesia

Lince Magriasti<sup>1</sup>, Aseng Yulanda<sup>2\*</sup>, Yulhendri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia  
\*Corresponding author, e-mail: asengyulanda@gmail.com

### Abstract

Analysing the Influence of Social Media on Political Economic policies. Social media is not only a wide communication platform but also having a crucial role in shaping public opinion, mobilizing public participation, and influencing the political economy. This research used a qualitative approach using literature review. The analysis in this article highlights the significant role of social media in political economy. Significantly, social media has transformed communication patterns, political participation, and interactions. Social media allows individuals and groups to quickly disseminate information about political and economic issues. In public policy studies, where the actions taken by the government can be influenced by the development of issues and the movement of opinion on social media. Economic and political policies cannot be separated from the response of people in cyberspace.

**Keywords:** Social Media, Political, Economic



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

---

### Pendahuluan

Seiring semakin majunya dunia digitalisasi, media sosial telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, Nasrullah dalam (Munzir 2019) menjelaskan Media sosial adalah *platform* di internet yang memungkinkan orang berkomunikasi dan berbagi informasi serta membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial tidak hanya menjadi *platform* komunikasi yang luas, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, memobilisasi partisipasi masyarakat, dan berpengaruh pada kebijakan ekonomi politik. Kekuatan media sosial cukup meyakinkan dalam upaya menyampaikan aspirasi masyarakat. Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang dibagikan oleh (Muhtar 2023) dalam Uici.ac.id pada 20 Januari tahun 2023, terdapat 167 juta orang di Indonesia yang menggunakan media sosial. Jika dipersentasekan dari jumlah penduduk Indonesia, bisa disimpulkan bahwa sekitar 78% penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial setidaknya hingga Januari 2023.

Dewasa ini, pemanfaatan media sosial seperti *Instagram*, *Tiktok*, *Youtube*, hingga *Twitter* semakin masif digunakan dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Dalam kajian ekonomi politik, Media sosial telah mengubah cara komunikasi, partisipasi politik, dan interaksi sosial secara luas. Besarnya angka pengguna media sosial di Indonesia menjadi satu peluang yang cukup menjanjikan untuk melakukan kegiatan ekonomi maupun politik. Saat ini, tidak jarang masyarakat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada Pemerintah, baik itu yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan atau permasalahan lainnya. Ekonomi dan Politik merupakan dua hal yang sangat vital dalam penyelenggaraan negara. Aktivitas politik akan berdampak pada ekonomi,

---

begitupun sebaliknya. Ruslin dalam (Kriswibowo dan Utomo, S, A 2020) menyatakan Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang di introdusir oleh pemerintah. Lebih lanjut Caporaso dan Levine dalam (Aprianto, 2018) memberikan penjelasan bahwa ekonomi politik tidak hanya menangani masalah sosial dan keterbelakangan, tetapi juga memberikan rekomendasi kepada para penyelenggara negara tentang cara mengelola masalah ekonomi. Sederhananya, ekonomi politik adalah hubungan antara elemen, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, harga, perdagangan, dan konsumsi. Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik dari segi kelembagaan maupun proses, dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Pergerakan komunikasi yang sangat cepat di media sosial menyebabkan hal tersebut cukup efektif dilakukan dan mampu menggiring opini publik serta cukup baik dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah, baik Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah. Sebagaimana yang dipahami bahwa Kebijakan Pemerintah sangat berpengaruh pada kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lainnya. Herdiana dalam (Desrinelti, Afifah, Gistituati 2021) menjelaskan bahwa Kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya menyelesaikan masalah. Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Barang politik yang berkaitan dengan kepentingan publik termasuk kebijakan publik. Contohnya saja baru-baru ini seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh Pendidikan di Australia membuat heboh khalayak dunia maya atas *statement* yang disampaikannya terkait kualitas pembangunan yang sangat buruk di Provinsi Lampung. Video yang dibagikannya viral dengan sangat cepat dan mencuri perhatian dari masyarakat hingga Pemerintah Pusat. Pasca video tersebut beredar dan menjadi perbincangan publik, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dan melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Hal itu merupakan salah satu kasus pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan aspirasi dan kritik kepada Pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan Informasi komunikasi di Indonesia, masyarakat semakin berani menyuarakan aspirasi dalam upaya mempercepat pembangunan, terutama fasilitas publik yang begitu penting untuk aktivitas masyarakat. Ruang digital yang sangat terbuka tentunya akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggiring opini, serta berdiskusi secara langsung terkait isu-isu terbaru yang berujung pada mempengaruhi kebijakan ekonomi politik di Indonesia. Dalam tulisan ini, akan dianalisis bagaimana pengaruh media sosial terhadap kebijakan ekonomi politik. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi media sosial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang baik. Sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui aspirasi yang disampaikan secara digital.

## **Kajian Pustaka**

### **Media Sosial**

Media sosial adalah media yang digunakan secara daring untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain secara luas, menghapus jarak dan waktu, dan memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain di mana pun dan kapan pun. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain secara virtual, tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk

---

---

terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan memperluas jaringan sosial mereka. Media sosial menyediakan *platform* untuk berbagi berbagai jenis konten seperti artikel, video, gambar, dan lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan hiburan dengan mudah dan cepat. Media sosial juga memberi penggunanya kesempatan untuk berkomunikasi, menemukan konten yang menarik, dan terlibat dalam berbagai topik atau kegiatan yang mereka sukai. Media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang dari berbagai latar belakang dan memperluas jaringan sosial mereka secara global. Selain itu, pemerintah, pebisnis, dan beberapa kalangan lainnya menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dan jasa mereka, serta untuk berinteraksi dengan masyarakat dan meminta pendapat mereka.

Media sosial adalah contoh langsung dari semakin pesatnya kemajuan teknologi di seluruh dunia. Pada awalnya, media sosial hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi seseorang, tetapi sekarang mereka juga berfungsi untuk memengaruhi iklim politik suatu negara. Firmstone & Soleman dalam (Latifah and Najicha 2022) menyatakan Media sosial dianggap lebih netral dan bebas dari kekuasaan negara, adalah salah satu pilar yang telah mengubah peran warga negara dalam pemerintahan. Pemerintah perlu beradaptasi dan responsif di tengah tren yang semakin marak untuk menyampaikan aspirasi melalui media sosial di era modern, karena masyarakat telah melekat teknologi. Dalam demokrasi, aspirasi masyarakat sangat penting karena masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sehingga penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses beroperasinya sistem pemerintahan. Untuk alasan ini, lembaga-lembaga pemerintah semakin sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan memungkinkan pemerintah untuk membuat peraturan dan kebijakan baru.

Dalam beberapa kepentingan media sosial difungsikan untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi serta menggali aspirasi publik. Pemerintah dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk lebih dekat dengan masyarakat karena media sosial adalah dokumentasi virtual, sehingga para pemimpin harus mengikuti tren, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respons segera. Tidak mengherankan bahwa Presiden Indonesia dan banyak politikus dan pemimpin daerah memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat.

### **Konsep Kebijakan**

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Suwitri 2008) Mendefinisikan Kebijakan merupakan suatu program yang bertujuan untuk mencapai tujuan, prinsip, dan praktik tertentu. Herdiana dalam (Desrinelti, Afifah, and Gistituati 2021) menyatakan kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana, dan keputusan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya memecahkan masalah. Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan dua pendapat sebelumnya dapat dipahami betapa sentralnya posisi kebijakan dalam suatu organisasi, terutama organisasi Pemerintahan. Kebijakan bisa menjadi penentu dari arah perkembangan sebuah organisasi.

Iskandar dalam (Suwitri 2008) menjelaskan kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu, pertama kebijakan diartikan sebagai upaya untuk mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan, kebijakan digunakan sebagai cara untuk menanggapi peristiwa. Kebijakan ini mengintensifkan pengawasan terhadap tindakan pihak yang terlibat dalam kerja sama yang tidak masuk akal, selain itu kebijakan juga dimaknai sebagai praktik sosial. Kebijakan tidak terisolasi. Artinya, kebijakan adalah susunan yang dibuat oleh pemerintah, atau pemerintah, sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau unik bagi masyarakat.

---

---

Berkaitan dengan kebijakan publik, maka suatu kebijakan ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah pemegang kekuasaan. Lemay dalam (Keban 2004) menyebutkan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah disebut kebijakan publik. Kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis sumber daya untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Lebih lanjut mengenai kebijakan publik, Wahab dalam (Ramdhani and Ramdhani 2017) menyatakan bahwa kebijakan publik berfokus pada pencapaian tujuan, bukan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan. Pada dasarnya, kebijakan publik terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah tentang apa yang dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah di bidang tertentu. Kebijakan publik dapat bersifat positif karena memberi pejabat pemerintah pedoman tentang bagaimana menangani masalah tertentu atau negatif karena memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa.

Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang tertentu, pemerintah menetapkan kebijakan publik yang tepat dengan langkah-langkah pengambilan kebijakan publik yang baik. Tindakan ini dilakukan secara sadar, sengaja, dan terarah, dengan menggunakan pedoman dan peraturan yang diatur dalam sistem perundang-undangan. Barang politik yang berkaitan dengan kepentingan publik termasuk kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu atau sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar karena hanya memberikan pedoman umum untuk bertindak untuk mencapai tujuan tersebut. Keputusan Pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa atas suatu isu dan permasalahan juga bagian dari kebijakan publik.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin (Denzin and Lincoln 2005) bahwa Penelitian kualitatif menilai kejadian secara keseluruhan dan sesuai dengan konteksnya, sehingga fokus pengamatan diperlukan untuk membuat hubungan dengan konteks lain dan membangun pembicaraan yang konsisten. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa data dokumentasi atau arsip. Teknik studi literatur digunakan dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan mengumpulkan referensi berupa buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan uji triangulasi sumber yang membandingkan data dokumenter dengan data observasi

### **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial aktif terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang dibagikan oleh (Muhtar 2023) Uici.ac.id pada 20 januari tahun 2023, terdapat 167 juta orang di Indonesia yang menggunakan media sosial. Jika dipersentasekan dari jumlah penduduk Indonesia, bisa disimpulkan bahwa sekitar 78% penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial setidaknya hingga januari 2023. melalui data tersebut dapat dipahami betapa media sosial menjadi satu media yang sangat potensial untuk melakukan banyak aktivitas oleh masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan seperti sosial, ekonomi, politik, dan lainnya bisa dilakkuan di media sosial. Terlepas dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penggunaan media sosial, pemanfaatan media sosial untuk kepentingan yang lebih luas menjadi poin penting harus dicatat.

---

Orang-orang tidak hanya menggunakan media sosial untuk memperluas jejaring atau bahkan hanya sekedar eksistensi, akhir-akhir ini pengguna media sosial sudah mulai menyadari betapa kekuatan *platform* yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif lainnya, salah satunya adalah dalam mempengaruhi kebijakan publik. Arus komunikasi yang begitu kencang memungkinkan satu permasalahan bisa *trending* hanya dalam hitungan menit lalu menjadi pembicaraan masyarakat di dunia maya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, media sosial menjadi satu tempat bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kritik kepada Pemerintah, hal itu merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Serta peranan media sosial atas kebijakan publik dalam konteks ekonomi politik, dengan fokus pada akses informasi, partisipasi publik, pengaruh opini, kampanye promosi, dan pengawasan.

Dalam hal ekonomi politik yang merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana ekonomi dan politik berinteraksi satu sama lain dalam struktur sosial. Kajian ini berfokus pada bagaimana kekuatan media sosial mempengaruhi kebijakan ekonomi politik. Isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, distribusi kekayaan, pengaruh korporasi, globalisasi, dan peran negara dalam mengatur ekonomi juga menjadi perhatian dalam kajian ekonomi politik. Dalam era teknologi modern, peran media sosial dalam ekonomi politik sangat penting. Secara signifikan, media sosial telah mengubah pola komunikasi, partisipasi politik, dan interaksi sosial. Media sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk dengan cepat menyebarkan informasi tentang masalah politik dan ekonomi, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke berbagai perspektif dan pendapat serta mempengaruhi opini publik. Media sosial telah menjadi alat penting untuk aktivitas politik dan mobilisasi massa. Individu dan kelompok dapat dengan mudah mengatur demonstrasi, kampanye politik, dan gerakan sosial untuk memengaruhi kebijakan publik dan perubahan sosial dengan menggunakan platform media sosial. Media sosial memberi orang kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ekonomi dan kebijakan politik melalui komentar, berbagi konten, dan interaksi virtual. Dengan demikian, media sosial dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap masalah ekonomi dan politik.

Baru-baru ini masyarakat menunjukkan kekuatannya melalui media sosial dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan. Ketika seorang mahasiswa asal Indonesia dikenal dengan nama Bima yang sedang menempuh Pendidikan di Australia membuat heboh khalayak dunia maya atas *statement* nya terkait kualitas pembangunan yang sangat buruk di Provinsi Lampung. Video yang dibagikannya viral dengan sangat cepat dan mencuri perhatian dari masyarakat hingga Pemerintah Pusat. Video tersebut dibagikan oleh banyak akun tidak hanya pada satu media sosial, dan masyarakat dengan kompak menunjukkan dukungan terhadap mahasiswa tersebut. Walaupun pro dan kontra muncul di berbagai kolom komentar, namun pengaruh yang diberikan oleh video tersebut tidak bisa dikesampingkan. Pasca video tersebut beredar dan menjadi perbincangan publik, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dan melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Dari pantauan penulis media sosial juga masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat tentang kelanjutan dari hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil alih beberapa pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi tersebut. Walaupun Pemerintah Daerah Lampung berusaha untuk menyangkal kritik yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut, tetap saja arus informasi di media maya tidak terbandung. Hal tersebut menjadi bukti betapa efektifnya media sosial dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Walaupun pada faktanya tidak semua ditanggapi dan berbuah menjadi kebijakan publik.

---

Contoh lainnya dalam dunia politik bertepatan pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Satu video viral setelah diunggah di media sosial terkait salah satu kandidat yang diduga melakukan pelecehan agama dengan mencatutkan salah satu ayat Al-Qur'an di dalam pidatonya. Video tersebut beredar dengan sangat cepat dan mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Pada akhirnya video tersebut melahirkan sebuah gerakan yang dikenal dengan 212, dimana lautan manusia berkumpul di Jakarta untuk melakukan demonstrasi. Percakapan masyarakat di media sosial cukup banyak yang menyudutkan kandidat tersebut dan mampu menggiring opini publik dengan cepat hingga berujung pada mobilisasi massa. Tidak sedikit yang menilai kegagalan kandidat tersebut dalam kontestasi pilkada 2016 di DKI Jakarta karena video tersebut yang viral di media sosial. Padahal sebelum adanya kasus tersebut, sang kandidat merupakan calon unggulan dan memimpin di banyak lembaga *survey*.

Dua contoh sebelumnya menunjukkan kepada kita betapa signifikannya pengaruh media sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan dan kebijaksanaan oleh penggunanya. Saat ini, media sosial juga telah berkembang menjadi alat penting dalam kampanye politik dan pemilihan umum. Kandidat politik menggunakan media sosial untuk membangun citra, berkomunikasi dengan pemilih, dan mendapatkan dukungan. Selain itu, media sosial memungkinkan pemilih secara langsung mendapatkan informasi tentang kandidat dan masalah politik. Bisnis juga dapat memasarkan barang dan jasa mereka dengan lebih baik di media sosial.

Media sosial memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap komunikasi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik di era digital sekarang ini. Media sosial memberikan platform untuk partisipasi publik yang lebih luas dalam proses ini, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan yang sedang dibahas, memberikan pendapat mereka, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Hal ini memungkinkan suara masyarakat yang tidak terdengar sebelumnya untuk didengarkan dan mempengaruhi kebijakan. Masyarakat dapat dengan mudah mengadakan demonstrasi, petisi, atau kampanye untuk mengubah kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat berkat kecepatan informasi yang cepat melalui media sosial. Gerakan sosial seperti ini dapat menimbulkan tekanan politik yang besar dan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya.

Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan terlibat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Masyarakat sekarang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kebijakan yang sedang dibahas. Mereka dapat mengikuti akun resmi organisasi, pemerintah, atau tokoh publik yang terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi secara real-time dan langsung dari sumbernya. Media sosial juga menyediakan platform yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses kebijakan publik. Melalui komentar, atau bahkan petisi secara digital, anggota komunitas dapat memberikan pendapat, komentar, atau saran. Hal ini memungkinkan suara masyarakat yang tidak terdengar sebelumnya untuk didengarkan dan mempengaruhi kebijakan.

Dalam hal transparansi Pemerintahan, media sosial membantu meningkatkan transparansi pemerintah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik. Melalui laporan, foto, atau video yang dibagikan di media sosial, masyarakat dapat melihat dan mengawasi tindakan pemerintah. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab. Media sosial tidak hanya dapat digunakan oleh masyarakat dalam hal yang disebutkan sebelumnya, tetapi pemerintah juga dapat menggunakannya untuk mempromosikan kebijakan terbaru dan mempercepat proses sosialisasi, terutama di bidang ekonomi politik. Media sosial dapat digunakan oleh aktor ekonomi atau politik untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan untuk kebijakan yang mereka

---

---

inginkan. Ini dapat berdampak pada proses pembentukan kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Media sosial memiliki pengaruh yang sangat luar biasa saat ini, berbagai macam aktivitas dilakukan di media sosial. Kekuatan yang dimiliki oleh media sosial berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, baik yang secara eksplisit berhubungan dengan ekonomi maupun politik. Penggiringan opini yang begitu masif, serta mobilisasi massa secara daring yang sulit dibendung memberikan potensi yang sangat besar dalam stabilitas politik maupun pertumbuhan ekonomi. Dalam kajian kebijakan publik dimana tindakan yang diambil oleh Pemerintah bisa terpengaruh dari perkembangan isu dan penggiringan opini di media sosial. Kebijakan-Kebijakan ekonomi dan politik tidak bisa lepas dari tanggapan masyarakat di dunia maya. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat di media sosial sangat berdampak pada pengambilan kebijakan ekonomimi politik.

### **Kesimpulan**

Peran media sosial dalam ekonomi politik sangat signifikan dalam era digital saat ini. Media sosial telah mengubah cara komunikasi, partisipasi politik, dan interaksi sosial secara luas. Media sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk dengan cepat menyebarkan informasi tentang isu-isu politik dan ekonomi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda, serta mempengaruhi opini publik, partisipasi masyarakat, dan interaksi sosial. Melalui platform media sosial, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah, yang merupakan bagian dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Media sosial juga memungkinkan permasalahan menjadi viral dalam hitungan menit, menciptakan arus komunikasi yang kencang. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- APRIANTO, NAERUL EDWIN KIKY. 2018. "KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8(2).
- Denzin, NK, and YS Lincoln. 2005. "Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*." *The Sage*.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6(1).
- Keban, Yeremias T. 2004. "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep." *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*.
- Kriswibowo, A., and P. Utomo, S, A. 2020. *Ekonomi Politik Indonesia Di Tengah Pandemi*.
- Latifah, Khasanah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(1).
- Muhtar. 2023. "7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan Di Indonesia." *Uici* 4(1): 1–3.
- Munzir, Atika Aisyarahmi. 2019. "Beragam Peran Media Sosial Dalam Dunia Politik Di

Indonesia.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7(2).

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik*.

Suwitri, Sri. 2008. “Konsep Dasar Kebijakan Publik.” *Atmospheric Environment* 42(13).